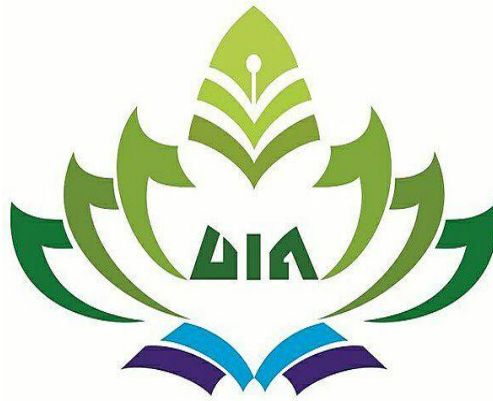


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI
BENCANA MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DI KELURAHAN
KOTA KARANG KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
KOTA BANDAR LAMPUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Oleh

Adi Sucipto

NPM. 1441020076

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA
MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA BANDAR LAMPUNG DI KELURAHAN KOTA KARANG
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah



Pembimbing I : Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd

Pembimbing II : Faizal, S.Ag., M.Ag

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DI KELURAHAN KOTA KARANG KECAMAAN TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ADI SUCIPTO

Pemberdayaan yaitu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengembangan masyarakat yang dilakukan dalam proses memberdayakan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, penulis melihat banyak masyarakat yang mendirikan rumah di dekat sungai khususnya masyarakat di Kelurahan Kota Karang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang bencana rendah. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada penyelesaiannya maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun pengumpulan data didapat dari hasil observasi untuk melihat fakta lapangan, wawancara dan juga dokumentasi. Untuk menentukan populasi dan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan data yang didapat bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yaitu melalui penyadaran dalam bentuk sosialisasi, penguatan yaitu simulasi bencana, dan pendayaan yang berupa desa tangguh bencana (destana) guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebencanaan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Mitigasi Bencana



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jln. Let. H. Endro Suratmin Sukarampe Bandar Lampung (35131)

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DI KELURAHAN KOTA KARANG KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama : Adi Sucipto

Npm : 1441020076

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah diperiksa dan dikoreksi oleh pembimbing I dan II. Maka untuk itu pembimbing I dan pembimbing II menyetujui untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqoah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. M. Syaifuddin, M.Pd
NIP : 196202251990011002


Faizal, S.Ag.M.Ag
NIP : 19690117199031001

Mengetahui
Ketua Jurusan PMI


Dr. M. Mawardi J. M. Si
NIP : 196612221995031002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jln. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131)

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG DI KELURAHAN KOTA KARANG KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG"** yang ditulis oleh: Adi Sucipto, NPM: 1441020076, Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari Jum'at tanggal 8 bulan Nopember tahun 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si

Sekretaris : Fiqih Satria, M.T.I

Penguji I (Utama) : Dr. Jasmadi, M.Ag

Penguji II (Kedua) : Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd

DEKAN

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP.196104091990031002

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid (57) : 22)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahanda Sukijan (Alm.) dan Ibunda Suci tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa. Senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah untuk kedua orang tuasaya.
2. Kakakku yang selalu memberikan motivasi dan semangat, Nanik dan Yayuk, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2014, yang selalu memberikan nasehat dan semangat yang selalu mengingatkan dan membantu saya selama pembuatan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman kosan yang selalu mengerti dan member semangat
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Adi Sucipto dilahirkan di Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 28 Agustus 1995. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Terlahir dari pasangan yang harmonis dan selalu bahagia yaitu Bapak Sukijan dan Ibu Suci.

Pendidikan dimulai dari SDN 04 Tirta Kencana dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP N 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMA N 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan selesai pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015.



Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

Adi Sucipto
NPM. 1441020076

KATA PENGANTAR

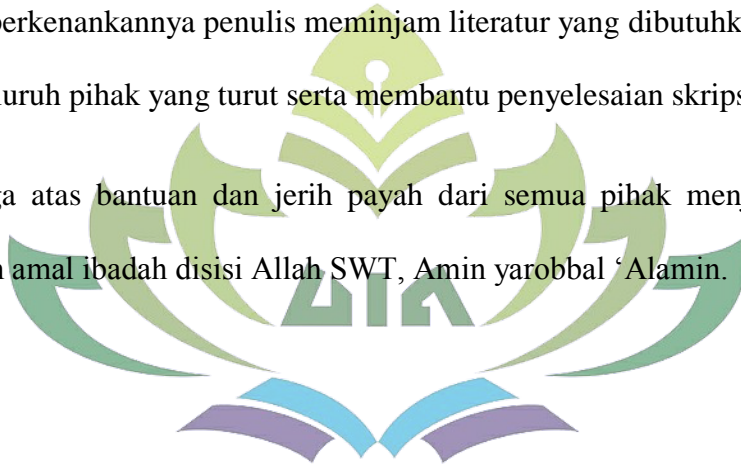
Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas kuasa dan ridha-Nya jugalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Bandar Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan oleh karena itu,penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Khomsahrial Romli,M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Bandar Lampung.
2. Bapak Dr. M. Mawardi J, M. Si selaku kepala jurusan dan bapak Hi. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I selaku sekretaris jurusan pengembangan masyarakat islam, terima kasih atas saran, arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. M. Syaifuddin, M.Pd. selaku pembimbing pertama penulis atas kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak Faizal, S.Ag,M.Ag. selaku pembimbing kedua atas bimbingan, arahan dan saran kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen, dan Staf karyawan Fakultas Dakwah yang telah membekali Ilmu kepada penulis.
6. Pengurus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung atas bantuan data, kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Kepala dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Bandar Lampung dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung atas diperkenalkannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Seluruh pihak yang turut serta membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan jerih payah dari semua pihak menjadikan catatan amal ibadah disisi Allah SWT, Amin yarobbal ‘Alamin.



Bandar Lampug, Oktober 2019
Penulis,

Adi Sucipto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PESEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	3
C. LatarBelakangMasalah	4
D. RumusanMasalah.....	7
E. TujuanPenelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. MetodePenelitian	8
H. Metode Pengumpulan Data	14
I. Metode Analisa Data	16
J. Penelitian Terdahulu	18

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

A. Pemberdayaan	
1. Pengertian Pemberdayaan.....	19
2. Tujuan Pemberdayaan	22
3. Tahapan Pemberdayaan	25
4. Proses Pemberdayaan	28
B. Mitigasi bencana	
1. Pengertian	35
C. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana	40

BAB III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

A. ProfilBPBD	
1. Umum	43
B. Kelurahan Kota Karang	
1. Sejarah	53
2. Visi dan Misi	54
3. Keadaan Masyarakat	54
C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	55

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

A. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana.	62
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program	

1. Faktor Pendukung	65
2. Faktor Penghambat	65
C. Hasil yang Dicapai dari Program	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA71

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Interview
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 4 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 5 : Kartu Bukti Hadir Munasabah
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Fakultas Dakwah
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan keseluruhan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung”.

Pemberdayaan yaitu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pengembangan masyarakat yang dilakukan dalam proses memberdayakan.¹

Istilah ‘pemberdayaan’ adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan- dengan istilah pengembangan.²

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam

¹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), hal. 270

² Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2001), hal. 41-41

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³

Pranarka dan Moeljarto (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan disebutkan sebagai upaya menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian, lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta mempebesar pengaruh individu terhadap proses dan hasil pembangunan.⁴

Pemberdayaan menurut Parsons sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.⁵

Pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.⁶

M.J Herskovits, Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara tertentu. Adapun pemberdayaan masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah bentuk kegiatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan

³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Cet. Ke-4 hal. 59-60

⁴ Panarka, A.M.W. & Prijono, O.S, *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996)

⁵*Ibid*, hal. 59

⁶Anwar, Oos, M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 49

pembangunan serta kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.⁷

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Dari uraian diatas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu studi tentang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tentang bencana.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui mitigasi bencana.

⁷Ari Sandhyavitri, *MITIGASI Bencana Banjir dan Kebakaran*, (Riau: UR Press, 2015), hal. 1

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, tempat yang mudah dijangkau, serta data-data yang dibutuhkan tersedia sehingga tidak menyulitkan untuk mengadakan penelitian. Dan penelitian ini sesuai dengan jurusan PMI.

C. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, lempeng Benua Australia, lempeng Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sisanya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa.

Selain itu, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir.⁸

⁸www.bnpb.go.id/home/potensi situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada bencana banjir. Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab seperti curah hujan, iklim, geomorfologi wilayah, dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak (Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir). Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia terutama pada saat musim penghujan. Berdasarkan sudut pandang morfologi, banjir terjadi di negara-negara yang mempunyai bentuk bentang alam yang sangat bervariasi dengan sungainya yang banyak. Berdasarkan hasil rekapitulasi bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir sebanyak 3990 kejadian (39%), angin puting beliung sebanyak 1171 kejadian (17%), dan tanah longsor sebanyak 1600 kejadian (16%). Banjir di Indonesia umumnya terjadi di Indonesia bagian barat, karena tingkat curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Terlebih lagi, curah hujan yang tinggi di wilayah Indonesia bagian barat belum didukung dengan penyediaan infrastruktur drainase yang memadai sehingga aliran air tidak berjalan lancar. Dengan melihat fakta-fakta diatas

maka persiapan tentang kesiap siagaan menghadapi bencana sangat lah penting. Memasuki musim penghujan,

Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung mewaspadaai 17 tempat daerah rawan banjir di wilayah kota. Dari jumlah itu, BPBD fokus di empat titik yang menjadi langganan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi.⁹ Menurut Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Bandar Lampung (Bapak Ghani), empat titik yang menjadi fokus utama pihaknya yaitu Pesawahan, Kuripan, Kota Karang, dan Way Balau. Selain itu menurut Kepala BPBD Kota Bandar Lampung setidaknya ada 8 kecamatan yang rawan banjir. Diantaranya yaitu Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Panjang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Bumi Waras, dan Kedamaian. Pemetaan ini berdasarkan data penelitian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016-2020.¹⁰

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, penulis melihat banyak masyarakat yang mendirikan rumah di dekat perairan khususnya masyarakat di Kelurahan Kota Karang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang bencana rendah. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada penyelesaiannya maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik dan memandang perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana melalui Badan Penanggulangan

⁹www.REPUBLIKA.CO.ID, 23 Desember 2018

¹⁰www.TribunLampung.co.id, Minggu 8 Oktober 2017 11:18

Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan hal sebagai berikut :

Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

F. Kegunaan Penelitia

1. Kegunaan atau signifikansi teoritis masalah bagi jurusan PMI dalam hal strategi pemberdayaan masyarakat, modal sosial, dan partisipasi masyarakat.
2. Kegunaan atau signifikansi praktis. Penelitian ini sebagai masukan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoptimalkan kegiatan mitigasi bencana.

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Strategi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Menurut John W. Creswell ada tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods (mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam

bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.¹¹

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang luas. Mengelola data dari spesifik menjadi tema umum dan menginterpretasikan makna dibalik data. Peneliti memfokuskan pada pemahaman pengalaman partisipan.

Dalam penelitian kualitatif berdasarkan bentuknya menggunakan kata-kata. Berdasarkan pertanyaannya terbuka (hipotesis kualitatif). Pengambilan sample dengan sengaja, analisa teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan table, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti dalam mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. Peneliti berinteraksi secara langsung (*face to face*) dengan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, dengan pejabat Kelurahan Kota Karang, dan warga kelurahan Kota Karang. Peneliti mengumpulkan data sendiri, data

¹¹John W. Creswell, *Research Design*, di terjemahkan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 4 - 5

didapatkan dari berbagai sumber, peneliti mengolah tema-tema menjadi serangkaian tema yang utuh, peneliti fokus mempelajari makna yang disampaikan partisipan, proses penelitian berkembang secara dinamis sesuai dengan keadaan di lapangan, peneliti menggunakan perspektif teoritis terutama perspektif pemberdayaan masyarakat, peneliti menafsirkan dari penemuan di lapangan, dan memberikan gambaran secara kompleks dari penelitiannya.

b. Strategi Penelitian

Strategi-strategi penelitian kualitatif yaitu : Etnografi,, Grounded Theory, Studi Kasus, Fenomenologi, dan Naratif. Pada penelitian ini menggunakan Studi Kasus. Studi Kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.¹²

Penelitian ini berbentuk strategi penelitian studi kasus karena penulis meneliti secara cermat dari suatu program. Penelitian ini mengungkapkan gambaran data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan baik kata-kata, gambar atau foto, catatan lapangan atau dokumen lainnya. Sebagai upaya menjelaskan

¹²Ibid, hal. 19-20

masalah yang diteliti, sehingga akan tergambar dengan jelas kondisi permasalahan yang diteliti.

2. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Karena dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan kegiatan secara jelas dan apa adanya. Dalam hal ini penulis menjelaskan keadaan objek yang sebenarnya berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dari berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya pengambilan data yang ada di lapangan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung.

3. Populasi dan Sample

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen yang terikat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam hal mitigasi bencana, antara lain semua petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dan masyarakat Kota Karang. Adapun masyarakat yang mengikuti program berjumlah 30 orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan sample adalah sebagian dari populasi. Atau menurut pendapat lain sample adalah sebagian populasi atau wakil yang diteliti.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan metode non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Lebih lanjut, teknik non random sampling yang penulis gunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu dimana dalam purposive sampling pemilihan kelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.

Ciri-ciri populasi yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

Petugas BPBD Kota Bandar Lampung :

- a. Kepala bidang kesiapsiagaan bencana (bidang yang khusus menangani tentang kesiapan menghadapi bencana).
- b. Pembina yang memberikan pelatihan secara aktif.

Masyarakat Kota Karang :

- a. Masyarakat yang memiliki wilayah paling rawan terhadap bencana banjir.
- b. Masyarakat yang aktif dalam mengikuti program.

Berdasarkan kriteria diatas yang menjadi sampel adalah 2 orang Petugas BPBD Kota Bandar Lampung dan 2 orang masyarakat Kelurahan Kota Karang, sehingga yang menjadi sampel total keseluruhannya berjumlah 4 orang yang diambil oleh peneliti.

¹³ Surahromo Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke -14, hal. 145

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Yang masing-masing informan sudah berpengalaman dengan banjir untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, dapat berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang terdapat pada lokasi penelitian serupa. Data-data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, proposal pengerjaan, laporan

pertanggung jawaban, arsip, situs, dan sumber-sumber lain yang dapat diterima.

H. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk rekaman atau mencatat informasi. Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga jenis strategi, yaitu :

a. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.

Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Interview yang digunakan ini adalah interview bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan

masih dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan responden.¹⁴

Penulis melakukan interview kepada sampel penelitian untuk menggali data yang akurat.

b. Observasi

Merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai nonpartisipan hingga partisipan utuh.¹⁵

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan (*participant observation*), yaitu pengamat berada di dalam subjek yang diamati dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pengamatan akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.¹⁶

c. Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid III*, (Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, t.th), hal. 127

¹⁵John W. Creswell, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 267

¹⁶Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal. 70

publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diary, suart, *e-mail*).¹⁷

Peneliti menggunakan dokumen karena dokumen adalah salah satu sumber yang baik dalam bentuk teks yang siap untuk dianalisis tanpa perlu interview dan observasi. Sehingga dokumen bisa dijadikan salah satu pelengkap dalam metode pengumpulan data.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis, dokumen tersebut berupa catatan resmi sesuai dengan keperluan penelitian untuk mendapatkan data-data yang objektif dan kongkrit.

I. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka proses selanjutnya merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan penelitian yaitu analisis data. Data yang telah didapat kemudian diidentifikasi secara keseluruhan dan kemudian diklarifikasikan jenis masing-masing.

Menurut bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Miles and Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai

¹⁷Ibid, hal. 267-270

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :*data reduction, data display, dan data consulusion drawing/verification.*

Pada pelaksanaan tahapan ini tidak dilakukan secara beruntutan, namun secara luwes dan fleksibel, disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan proses-proses tersebut saling berhubungan dan dan bereaksi selama dan sesudah pengumpulan data.

a. Reduksi

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasardan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, member kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.

b. Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarnya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan (verifikasi) data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan dengan cara deduktif.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini di

maksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang di ambil dari individu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

J. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Evan Sarli Rakasiwi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, tahun 2018, tentang Evektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung.
2. Skripsi Muhammad Kurnia Ramadhan, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, tahun 2016, tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Bencana Di Kota Bandar Lampung.

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.¹

Secara konseptual, pemberdayaan atau perkuasaan (*imporwerment*) yang bersasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karna ide utama pemberdayaan beresentuan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan dan minat mereka.²

¹ Anwas, Oos. M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.49

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009) cet-ke 2 h. 57.

Selain itu pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.³

Beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli, diantaranya:

- a. Shardlow sebagaimana dikutip oleh Isbandi Rukmito Adi, mengemukakan bahwa pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.⁴
- b. Biestek mengenai pemberdayaan, menurutnya prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menemukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi.⁵

³ Moh Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), h. 136

⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), h. 162

⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 33

McArdle sebagaimana dikutip oleh Syamsir Salam, mengemukakan bahwa lebih menitikberatkan pemberdayaan pada proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.⁶

Jika diruntut dari seluruh pengertian yang ada, penulis menyimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kemandiriannya dengan upaya menyediakan sarana yang dapat mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki masyarakat tersebut melalui berbagai kegiatan atau peluang yang ada, selain itu mereka dapat lebih aktif dan bisa berpartisipasi di dalam masyarakat, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dapat berpengaruh dalam lingkungannya dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada, agar terciptanya kesejahteraan bersama sesuai dengan harapan. Pada intinya pemberdayaan fokus pada tiga hal, yaitu:

⁶Syamsir Salam, MS., dan Amir Fadhilah, S.Sos., M.Si., *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 77

Pemberkuasaan, Penguatan kapasitas diri, dan Memandirikan. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan, dimana pemberkuasaan merupakan fase untuk menguatkan diri seseorang khususnya mereka yang rentan dan lemah serta mereka yang masih termarginalkan dalam kehidupan bermasyarakat, melalui partisipasi masyarakat yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut andil dalam kehidupan sosial melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan skill atau kemampuan yang ada sehingga tercipta kemandirian. Tentu saja kegiatan pemberdayaan dilakukan demi terwujudnya taraf hidup yang lebih baik. Menurut pandangan penulis, pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk merubah kehidupannya, dari yang tadinya belum mampu menjadi mampu, belum berdaya menjadi berdaya, belum berani menjadi berani. Semua hal tersebut akan terlaksana dengan baik jika masyarakat yang diberdayakan ikut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya.

2. Tujuan pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil), sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu mereka yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.⁷

Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung. Tujuan lainnya, pemberdayaan bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kesendirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan, serta juga meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pembangunan sumber pendapatan yang menunjang perekonomiannya⁸. Meskipun demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang dikerjakan. Tujuan pemberdayaan ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan bidang pendidikan atau bidang sosial.

⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2006), h. 60

⁸Dkk suhartini, *model pemberdayaan masyarakat*: (yogyakarta:pustaka pesantren, 2011), h. 7-8

- a. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil;
- b. Pada bidang pendidikan tujuan pemberdayaan adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahan yang ia hadapi.sedangkan;
- c. Tujuan pemberdayaan pada bidang sosial, misalnya, agar kelompok sasaran tersebut dapat menjalankan fungsi sosial kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.⁹

Pada intinya tujuan pemberdayaan dilakukan melalui berbagai proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang dianggap kurang berdaya dengan memanfaatkan berbagai peluang melalui kemandirian, agar mereka mampu mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga masyarakat yang berdaulat, sehingga sampai pada kehidupan sejahtera.

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*:(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008)., h.78-79

3. Tahapan Pemberdayaan

Tahapan-tahapan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan (*Engagment*)

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan yaitu, pertama penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh *Community Worker* hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim mengenai pendekatan apa yang akan dipilih, penyiapan petugas lebih diperlukan lagi bila dalam proses pemberdayaan masyarakat tenaga yang dipilih memiliki latar belakang yang berbeda antara satu sama lain seperti: pendidikan, agama, suku, dan strata. Kedua, Penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direktif.

b. Tahapan Pengkajian(*Assesment*)

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui tokoh- tokoh masyarakat (*Key Person*), tetapi juga dapat melalui kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*Felt Needs*) dan juga sumberdaya yang dimiliki klien atau lebih tepatnya jika menggunakan teori SWOT dengan melihat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threat*).

c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahapan pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahapan Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng atau kembali pada tahap-tahap awal.

f. Tahapan Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa

terbentuk suatu system komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan terminasi merupakan tahapan keputusan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan petugas tidak meninggalkan komunitas secara tiba-tiba walaupun proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.¹⁰

Tahapan pengembangan masyarakat ataupun program pemberdayaan masyarakat yang merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai kemajuan ketaraf yang lebih baik. Adapun upaya untuk pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya dalam memanfaatkan

¹⁰Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2004),h.56.

peluang

- c. Memberdayakan juga mengandung artimenanggulangi.¹¹

4. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Prijono dan dikutip oleh Rajuminropa, mengandung dua kecenderungan yaitu:

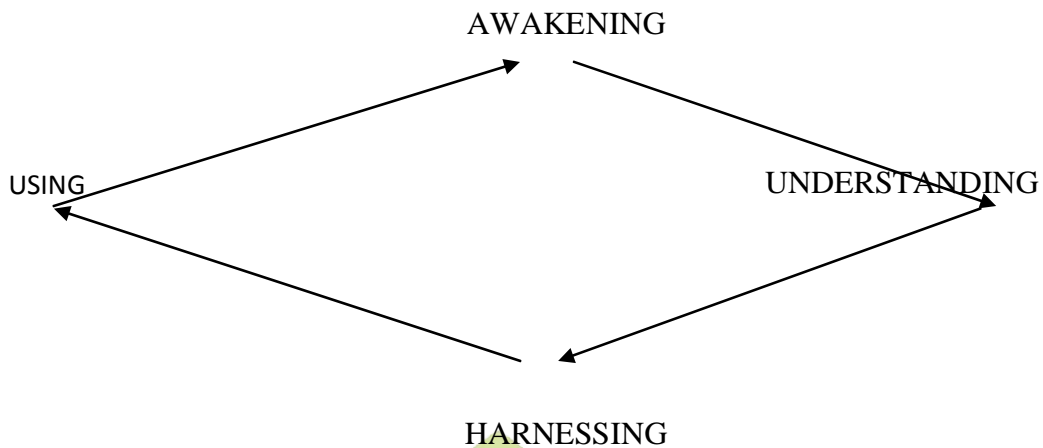
- a. Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
- b. Kecenderungan sekunder, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau berdaya untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹²

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku pada

¹¹Sumodiningrat Gunawan, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata), cet 2, h.165

¹² Rajuminropa, *Pemberdayaan Anak dari Keluarga Miskin* (Jakarta: Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2003), h.43.

satu program saja.¹³ Menurut Wilson yang dikutip oleh Nyoman Sumaryadi, proses pemberdayaan seperti gambar dibawah ini:



Dari gambar di atas menjelaskan pada tahap pertama dari proses pemberdayaan individu adalah „*awakening*“, yang membantu orang mengadakan penelitian terhadap situasi mereka saat ini, pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi. Mereka menilai kemajuan pekerjaan atau karir mereka terhadap rencana atau harapan mereka. Lebih jauh, mereka menilai dan menggambarkan kemampuan, sikap dan keterampilan mereka untuk menentukan apakah mereka secara efektif dimanfaatkan. *Awakening* menggerakkan orang ke dalam a state of readiness untuk menerima tantangan pemberdayaan.

Tahap kedua dari proses pemberdayaan individu adalah „*understanding*“. Orang mendapatkan pemahaman dan persepsi baru

¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2002),h.172.

yang sudah mereka dapat mengenai diri mereka sendiri, pekerjaan mereka, aspirasi mereka dan keadaan umum. Proses pemahaman (process of understanding) meliputi belajar untuk secara utuh mengharga pemberdayaan dan apa yang akan dituntut dari orang oleh organisasinya. Misalnya, proses mencari alasan mengapa mereka merasa cara mereka melakukan, dan kemudian mengembangkan suatu strategi atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah.

Tahap ketiga dari proses pemberdayaan adalah „*harnessing*“, yang diakibatkan oleh *awakening and understanding phases*. Individu yang sudah memperlihatkan keterampilan dan sifat, harus memutuskan bagaimana mereka dapat menggunakannya bagipemberdayaan.

Tahap terakhir dari proses tersebut adalah menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan kerja setiap hari. Pemberdayaan tidak merupakan proyek tunggal dengan awal dan akhir. Ia adalah sebuah filosofi, suatu cara di mana orang berpikir dan melaksanakan. Penyesuaian dan pelaksanaannya memerlukan pembinaan organisasi dan proses pendidikan yang berkelanjutan selamabertahun-tahun.¹⁴

Sedangkan menurut Hogan yang dikutip oleh Isbandi

¹⁴Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama 2005), h.130.

Rukminto Adi, menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima (5) tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan.
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan.
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan yang dikemukakan oleh Hogan di atas tentunya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari satu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas (*capacity building*).

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk

memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, tidak salah apabila dalam pengembangan kapasitas masyarakat terkandung makna pengembangan kapasitas manusianya sebagai aktor yang membentuk masyarakat.

Dalam penjabarannya, pengembangan kapasitas manusia ini dapat berupa pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespons dinamika lingkungannya, peningkatan skill, peningkatan akses terhadap informasi, peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai perubahan yang terencana, yang direncanakan, adalah bagaimana memberikan rangsangan dan dorongan agar masyarakat terbangun dan berkembang kapasitasnya.

Dengan demikian, walaupun energi eksternal ikut bekerja, yang lebih penting adalah membangun kapasitas internal masyarakat agar lebih mampu berkembang secara berkelanjutan. Apabila dalam perubahan yang terencana tersebut terkandung induksi atau masuknya energi eksternal, fungsinya tidak lebih sebagai sarana untuk merangsang kapasitas internal. Faktor eksternal yang diinduksikan dijaga agar tidak menimbulkan ketergantungan. Apabila kondisi ketergantungan yang terjadi maka dapat dikatakan induksi perubahan telah gagal karena tidak mampu membangun kapasitas internal. Dengan perkataan lain, kapasitas masyarakat telah terbangun apabila

induksi mampu mendorong kemandirian serta proses dinamika internal yang berkelanjutan.¹⁵

Menurut praktisi mitigasi Surono (mbah Rono) teknologi tidak akan berarti manakala masyarakat tidak tahu apa yang akan dia kerjakan.¹⁶ Oleh sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung hadir untuk memberikan induksi kepada masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Kota Karang agar mampu mandiri dalam hal kesiap siagaan bencana banjir.

Dalam memahami fenomena yang akan penulis teliti maka penulis menggunakan teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang dipelopori oleh Korten. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara. Selain itu teori ini disebut juga dengan *alternative development theory*. Adapun ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat :

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

¹⁵Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 252

¹⁶MetroTVNews.com, 23 Desember 2018, pukul 20:35 WIB

3. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
4. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
5. Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.
6. Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan

keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat.¹⁷

B. Mitigasi Bencana

Menurut Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008, mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana.¹⁸ Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Mitigasi bencana merupakan langkah yang perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Kegiatan mitigasi bencana diantaranya :

1. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana.
2. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

¹⁷Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 17-18

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Mitigasi Bencana*, Tahun 2007

3. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.
4. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung resiko bencana suatu daerah, harus mengetahui tingkat bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya.

Bahaya (*hazard*) menurut P2MB (Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana) merupakan suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Bahaya bisa menimbulkan bencana atau tidak menimbulkan bencana. Bahaya dianggap sebuah bencana (*disaster*) apabila telah menimbulkan korban dan kerugian.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.

Sedangkan bencana non-alam antara lain kebakaran hutan atau lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sementara itu, bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat. Dari sekian bencana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memilih bencana banjir untuk dijadikan kajian dalam skripsi ini.

Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana banjir didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di wilayah-wilayah Indonesia, peristiwa bencana banjir paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya, terutama pada saat musim penghujan. Hingga saat ini, permasalahan banjir belum dapat

terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Adapun penyebab banjir dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Banjir Kiriman

Aliran banjir yang datang dari daerah hulu di luar kawasan yang tergenang. Hal ini terjadi jika hujan yang terjadi di daerah hulu menimbulkan aliran banjir yang melebihi kapasitas sungainya atau banjir kanal yang ada, sehingga mengakibatkan terjadinya limpasan.

b. Banjir Lokal (banjir genangan)

Genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Pada banjir lokal, ketinggian genangan air antara 0,2 – 0,7 m dan lama genangan 1 – 8 jam. Banjir ini terdapat pada daerah yang rendah.

c. Banjir Rob (banjir air pasang)

Banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung air pasang dan/ atau air balik dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang.

Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya suatu daerah terkena banjir dengan didasarkan pada faktor-faktor alam yang mempengaruhi banjir. Adapun kawasan banjir dapat dikategorikan menjadi 4 tipologi, yaitu sebagai berikut :

a. Daerah Pantai

Daerah pantai merupakan daerah yang rawan banjir karena daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi permukaan tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (*mean sea level*) dan tempat bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai permasalahan penyumbatan muara.

b. Daerah Dataran Banjir (*Floodplain area*)

Daerah dataran banjir adalah daerah di kanan dan kiri sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang sangat subur sehingga merupakan daerah pengembangan (pembudidayaan) seperti perkotaan, pertanian, pemukiman, dan pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, industri, dan lain-lain.

c. Daerah Sempadan Sungai

Daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, akan tetapi di daerah perkotaan yang padat penduduk daerah sempadan sungai sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha sehingga apabila terjadi banjir akan menimbulkan dampak bencana yang membahayakan jiwa dan harta benda.

d. Daerah Cekungan

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Apabila penataan kawasan tidak terkendali dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat menjadi daerah rawan banjir.¹⁹

C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Manusia merupakan sumber daya utama atau berperan sebagai subjek baik dalam upaya meningkatkan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan atau peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan individu, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan, dalam perspektif pembangunan ini, didasari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non-material. Pemberdayaan sangat penting untuk meningkatkan perkembangan individu. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu individu untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait

¹⁹Ari Sandhyavitri, *MITIGASI Bencana Banjir dan Kebakaran*, (Riau:UR Press Pekanbaru,2015), hal. 12-14

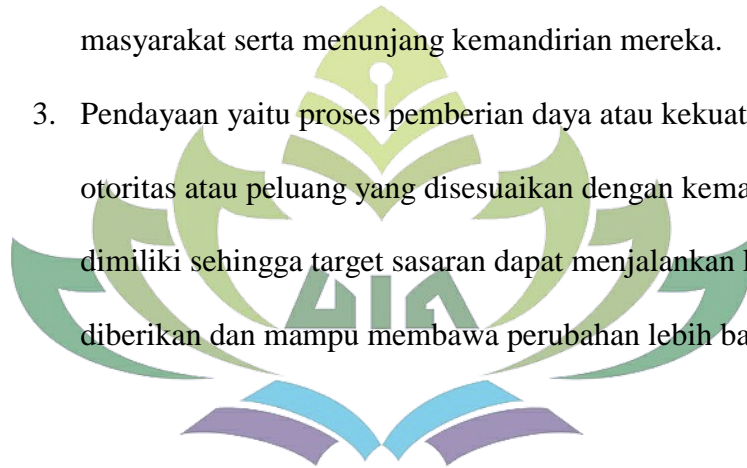
dengan diri individu termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya. Bencana merupakan kejadian yang datangnya tidak bisa diduga-duga sehingga perlu adanya persiapan dalam menghadapinya. Terdapat sebuah lembaga milik pemerintah yang memiliki wewenang dalam hal kebencanaan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada di pusat pemerintahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berada di daerah-daerah. Adapun tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, antara lain :

1. Penyadaran yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungan yang menyangkut lingkungan fisik atau teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk mencapai dialog dengan masyarakat.²⁰ Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

²⁰Artikel Tahapan Pemberdayaan Masyarakat, ditulis oleh Ir. Elwamendri, M.Si., 12 Maret 2017

Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

2. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²¹ Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat serta menunjang kemandirian mereka.
3. Pendayaan yaitu proses pemberian daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.



²¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 102

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

A. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sebelum terbentuk BNPB dan BPBD, Satuan Kerja yang bertanggung jawabkan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana adalah Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB), akan tetapi setelah terbentuk BNPB Bakornas PB dibubarkan.

Dampak dari dibubarkan Bakornas PB berimplikasi pada pembubaran rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB). BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat menteri dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana yang berada pada tingkat pusat atau nasional, sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah dan merupakan lembaga yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, termasuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Perda Nomor 5 Tahun 2010).

Pada tingkat provinsi, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau setingkat eselon Ib dan di tingkat Kabupaten/Kota, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon IIa. Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah Sekda.

Pembentukan BPBD diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, namun payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian pekerjaan, keanggotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008.

Unsur Pengarah penanggulangan bencana pada BPBD berada di bawah Kepala BPBD. Tugas Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya adalah membuat rumusan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketua Pengarah

dijabat oleh Kepala BPBD, anggotanya berasal dari instansi pemerintah daerah, golongan profesional dan tokoh masyarakat (Perda Nomor 5 Tahun 2010). BPBD terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung. BPBD Kota Bandar Lampung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 14.C Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. BPBD Kota Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung dan dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

Unsur pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Perda Nomor 5 Tahun 2010). Unsur Pelaksana BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010). Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:

1. KepalaPelaksana

Kepala pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan ataupun lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- b. Komando, dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan bencana, dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan. Hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan tugasnya, sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

- a. Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

- a. Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
- b. Seksi Logistik dan Perbekalan.

5. Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksanaa dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana padapascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;dan
- d. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

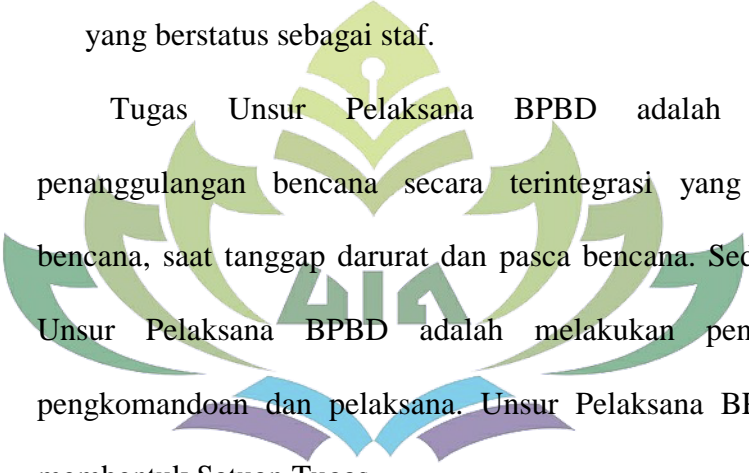
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

- a. SeksiRehabilitasi;
- b. SeksiRekonstruksi.

6. Kelompok JabatanFungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalamjenjang jabatan fungsional yang

berbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Sumber Daya Manusia atau pegawai yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penggerak utama dari pada seluruh kegiatan dan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari pegawai yang berstatus sebagai pejabat kepala badan, kepala bidang, kepala seksi, dan pegawai yang berstatus sebagai staf.



Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana BPBD adalah melakukan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk Satuan Tugas.

Jabatan Unsur Pelaksana BPBD diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Perda Nomor 5 Tahun 2010 merupakan acuan utama dalam teknis pembentukan BPBD di Kota Bandar Lampung.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program yang dimiliki oleh BPBD secara efektif dan efisien perlu adanya dukungan dengan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu sebagaiberikut:

1. Kendaraan operasional lapangan, antara lain:
 - a. Mobil tangki berikutkelengkapannya,
 - b. Mobil pemadam tipe snorkel (sebagai pengganti mobiltangga)
 - c. Mobilkomando,
 - d. Mobil *pickup*,
 - e. Mobilpatrol,
 - f. Mobil *rescue*,
 - g. Motor roda 3 dan motor *rescue*,
 - h. Perahu karet danmesin,
 - i. Tenda pleton, tendaregu,
 - j. Selang semprot, selangisap,
 - k. Mobil angkut pasukan(satgas),

Mobil pompa pengangkut air dan foam berikutdengan kelengkapannya seperti selang, kopling, dannozPeralatan teknik operasional, antara lain:Peralatan pendobrakan, antara, kapak, dongkrak, mesingergaji, mesin las, linggis, mesin chain saw, kompresor dan alat cat, selling dan rol, mesin pompa alkon, mesin pompa air, tali, genset, *life jacket*, *ring ball*, bor tangan/garenda, danlain-lain, Peralatan alat pemadam kebakaran dan kelengkapannya, Peralatan penyelamatan (*rescue*) antara lain: alat pernapasan buatan,

usungan dan kelengkapannya.

2. Sarana dan fasilitas perorangan, antara lain:

- a. Pakaian dan sepatu tahanapi,
- b. Helmet(*helm*),
- c. Alat pernapasanjinjing,
- d. Peralatan komunikasi .¹

B. Kelurahan Kota Karang

1. Sejarah

Pada abad ke-XVIII atau tahun 1800 Kelurahan Kota Karang dihuni dan dibuka oleh Pangeran Tanun Dewangsa dan Pangeran Tanun Jaya beserta keluarga. Mereka datang dari Sekala Bekhak dari keturunan Buay Nunyai. Nama Kelurahan Kota Karang ini sudah lama kita dengar sehingga tidak asing lagi bagi kita semua khususnya bagi masyarakat pesisir Bandar Lampung.

Kota Karang berasal dari kata aslinya yaitu Kuta Kakhang (berasala dari bahasa Lampung) yang diartikan sebagai Pagar Karang, sebab pada zaman dahulu Kelurahan ini dipinggir pantai Teluk Lampung, yang pada waktu itu tempat bersandarnya gerombolan bajak laut. Maka untuk pengamanannya dipagar dengan batu karang, maka Kelurahan ini dinamakan Kota Karang sampai pada saat ini.

¹ Data Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Kemudian pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 17 September 2012 Kelurahan Kotakarang dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kotakarang dan Kotakarang Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat menuju masyarakat Sejahtera.

b. Misi

Meningkatkan kualitas aparatur Kelurahan Kota karang Kecamatan Teluk Betung Timur.

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan saranaprasarana.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah KecamatanTelukBetung Timur Kelurahan Kotakarang melalui Program Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Keadaan geografis

Secara geografis Kelurahan Kotakarang merupakan dataran rendah terletak di sisi bantaran Sungai Way Belau yang langsung bermuara ke Laut Teluk Lampung serta diseberangi

oleh jembatan menuju Pulau Pasaran sebagai sentra pengolahan ikan asin dan ikan teri yang merupakan produk unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan luas wilayah Kelurahan Kotakarang \pm 35 Ha, terdiri dari 2 Lingkungan dan 21 Rukun Tetangga (RT).²

C. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, antara lain :

1. Sosialisasi Bencana Banjir

Pada tahap ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi tentang bencana banjir kepada masyarakat Kota Karang yang berjumlah 30 orang. Program sosialisasi dilakukan di balai kelurahan Kota Karang pada malam hari setelah sholat isya' dan durasi penyampaian materi kurang lebih 2 jam. Adapun pemateri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakilii oleh Bidang Kesiapsiagaan Bencana yaitu Kabid Kesiapsiagaan Bapak Ghani dan Kasi Mitigasi Bapak Gatot. Alat-alat yang digunakan dalam program sosialisasi antara lain LCD, Laptop, pengeras suara, spidol, dan kertas karton.

² Data dokumentasi Kelurahan Kota Karang

Adapun materi yang disampaikan antara lain tentang bencana banjir maupun tsunami, pendirian bangunan harus memiliki pondasi kira-kira setinggi 1 meter, pengenalan EWS (*Earthquake Warning System*) alat pendeteksi dini bencana tsunami yang akan berbunyi ketika akan terjadi bencana tsunami (tahun 2020 pemasangan), bersama-sama menggambar daerah rawan bencana, dan pengenalan tanda-tanda jalur evakuasi. Output dari program sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui pendidikan dan manajemen bencana, agar masyarakat tanggap dan tangguh terhadap bencana banjir maupun tsunami. Upaya penanganan bencana pada saat ini, mengalami perubahan paradigma maupun tindakan, yaitu dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi korban atau objek dari bencana namun juga sebagai pelaku dari penanggulangan bencana. Dari hasil penelitian, psikologi orang yang terkena bencana saat dia akan melakukan evakuasi atau dalam keadaan panik jarak pandangan mereka hanya 100 sampai 200 meter.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak atau risiko bencana serta meningkatnya taraf

kehidupan masyarakat. Dengan konsep, bahwa risiko bencana selalu ada dan tinggi dengan adanya bahaya dan kerentanan di masyarakat, maka risiko dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat pula. Maka upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan yang ada di masyarakat.³

2. Simulasi Bencana

Pada tahap ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung yaang terdiri dari Kabid Kesiapsiagaan dan Kasi Mitigasi ditambah dengan 8 orang staf bersama masyarakat melakukan kegiatan simulasi bencana. Simulasi dilakukan bersama dengan 30 warga dari Kelurahan Kota Karang yang dipusatkan di rusun Keteguhan, Teluk Betung Timur dan juga memanfaatkan sungai yang ada agar simulasi bencana lebih terkesan nyata. Alat-alat yang digunakan dalam simulasi bencana antara lain perahu karet, life jacket, tandu, sirine, pengeras suara, dan alat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Beberapa simulasi atau praktek penyelamatan dilakukan para tim yang sudah dilatih dalam penanganan bencana seperti banjir maupun tsunami, pertolongan pertama pada

³ Bapak Gatot sebagai Kasi Mitigasi, Wawancara, pada tanggal 2 September 2019

korban, dan pembidaian atau pertolongan pada korban yang mengalami patah tulang. Output dari simulasi bencana yaitu masyarakat dapat memahami dan dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat pada saat bencana terjadi serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam hal kebencanaan.

3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)

Selanjutnya setelah melakukan sosialisasi dan simulasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung membentuk desa tangguh bencana (destana).⁴ Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi, meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya. Di Kelurahan Kota Karang merupakan tempat pertama pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Provinsi Lampung. Adapun pelaku utama dalam program

⁴ Bapak Gani sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana, Wawancara, pada tanggal 2 September 2019.

desa tangguh bencana adalah 30 orang yang telah mengikuti program sosialisasi dan simulasi bencana dari BPBD Kota Bandar Lampung. Adapun kedudukan BPBD Kota Bandar Lampung yaitu sebagai petugas pendampingan. Dalam desa tangguh bencana masyarakat berperan aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka atau dapat dikatakan 30 orang tersebut menjadi motor penggerak di Kelurahan Kota Karang.

Prinsip-prinsip desa tangguh bencana :

1. Bencana adalah urusan bersama.
2. Berbasis pengurangan risiko bencana.
3. Pemenuhan hak masyarakat.
4. Masyarakat menjadi pelaku utama.
5. Dilakukan secara partisipatoris.
6. Mobilisasi sumber daya lokal.
7. Inklusif.
8. Berlandaskan kemanusiaan.
9. Keadilan dan kesetaraan gender.
10. Keberpihakan pada kelompok.
11. Transparansi dan akuntabilitas.
12. Kemitraan.

13. Multi ancaman
14. Otonomi dan desentralisasi pemerintahan.
15. Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan.
16. Diselenggarakan secara lintas sektor.

Tujuan dari pada desa tangguh bencana ini adalah :

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis.
5. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat).

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana ditempatkan sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan

lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Menurut Sahrial setelah mengikuti program yang diberikan oleh BPBD Kota Bandar Lampung dirinya memiliki pengetahuan tentang kebencanaan banjir yang lebih dan akan mengaplikasikan ilmu yang telah didapkannya dari program tersebut di Kelurahan Kota Karang.⁵ Sedangkan menurut Heru yang juga warga yang mengikuti program dari BPBD Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwasannya dirinya sudah mampu memberikan pertolongan pertama pada korban yang terdampak bencana banjir dan dapat melakukan pembidaian pada korban patah tulang.⁶ Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka.

⁵ Sahrial sebagai warga yang mengikuti program dari BPBD Kota Bandar Lampung, wawancara, 10 September 2019.

⁶ Heru sebagai warga yang mengikuti program dari BPBD Kota Bandar Lampung, wawancara, 10 September 2019.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA

A. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada di pusat pemerintahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berada di daerah-daerah (provinsi atau kabupaten atau kota) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal kebencanaan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dan dalam hal bencana penulis memfokuskan penelitiannya pada bencana banjir di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam memahami fenomena yang penulis teliti maka penulis menggunakan teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang dipelopori oleh Korten. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar maupun memperkuat negara.

Adapun peningkatan kapasitas yang dimaksud mencakup beberapa hal, antara lain :

1. Individu

Program sosialisai tentang kebencanaan khususnya bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bandar Lampung bersama masyarakat Kelurahan Kota Karang memberikan output yang sangat bermanfaat pada masyarakat Kelurahan Kota Karang. Setelah mengikuti program sosialisasi tentang kebencanaan khususnya bencana banjir masyarakat Kelurahan Kota Karang memahami atau terjadi peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang bencana banjir serta apa yang harus dipersiapkan jika bencana banjir terjadi di daerah mereka. Selain itu, BPBD Kota Bandar Lampung bersama dengan

masyarakat Kelurahan Kota Karang melakukan simulasi bencana banjir yang memanfaatkan sungai yang ada di lingkungan setempat. Adapun output yang didapatkan dari program tersebut yaitu masyarakat dapat memahami dan dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat pada saat bencana terjadi serta masyarakat memiliki keterampilan dalam hal kebencanaan.

2. Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, program yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bandar Lampung bersama dengan masyarakat Kelurahan Kota Karang yaitu membentuk desa tangguh bencana (destana). Adapun desa tangguh bencana (destana) yang ada di Kelurahan Kota Karang merupakan desa tangguh bencana pertama yang dibentuk di Provinsi Lampung. Pelaku utama dalam desa tangguh bencana di Kelurahan Kota Karang adalah masyarakat yang telah mengikuti program sosialisasi dan simulasi bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bandar Lampung bersama masyarakat setempat. Adapun kedudukan BPBD Kota Bandar Lampung dalam desa tangguh bencana yaitu sebagai petugas pendampingan. Dalam desa tangguh bencana (destana), Masyarakat yang telah mengikuti program sosialisasi dan simulasi bencana diharapkan mampu menjadi penggerak kepada masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut dalam hal kebencanaan khususnya bencana banjir.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan program

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan maka penulis menganalisis berbagai temuan dilapangan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana.

1. Faktor Pendukung

Dari data yang telah penulis peroleh bahwasanya faktor pendukung yang paling utama dalam program pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana adalah program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sifat dari bencana yang datang secara tiba-tiba mengharuskan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana harus siap menghadapi ancaman bencana setiap saat.

Melihat fakta dilapangan yaitu banyak pemukiman masyarakat di dekat perairan mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan bencana rendah. Akan tetapi, semuanya tidak menjadi berarti setelah masyarakat mendapatkan sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dan bersama-sama membentuk desa tangguh bencana (destana). Sehingga masyarakat kelurahan Kota Karang dapat mempersiapkan diri terhadap bencana yang sewaktu-waktu datang.

2. Faktor Penghambat

Dalam suatu program pasti ada kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang penulis peroleh, faktor utama yang menjadi

penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat adalah faktor pendidikan.

Masyarakat kelurahan Kota Karang yang mayoritas tingkat pendidikannya hanya lulusan SD menyebabkan program dilaksanakan agak terhambat. Akan tetapi, karena program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka kendala tersebut tidak menjadi masalah yang serius.

C. Hasil Yang Dicapai dari Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari program pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kota Karang hasilnya sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis.

5. Meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapatlah diambil inti pembahasan atau kesimpulan yaitu Proses pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, antara lain :

1. Penyadaran

Pada tahap ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang daerahnya rawan terkena bencana yaitu masyarakat kelurahan Kota Karang. Tujuan dari pada sosialisasi ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana khususnya banjir.

Dengan konsep, bahwa risiko bencana selalu ada dan tinggi dengan adanya bahaya dan kerentanan di masyarakat, maka risiko dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat pula. Maka upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan yang ada di masyarakat.

2. Penguatan

Pada tahap ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung bersama masyarakat melakukan kegiatan

simulasi bencana. Simulasi dilakukan bersama dengan 30 orang dari Kelurahan Kota Karang yang dipusatkan di rusun Keteguhan, Teluk Betung Timur. Beberapa simulasi atau praktek penyelamatan dilakukan para tim yang sudah dilatih dalam penanganan bencana seperti banjir maupun tsunami.

3. Pendayaan

Selanjutnya setelah melakukan sosialisasi dan simulasi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung membentuk desa tangguh bencana (destana). Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi, meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya. Adapun pelaku utama dalam program desa tangguh bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Dalam desa tangguh bencana masyarakat berperan aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, mamantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai masukan. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Saran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung agar bisa meningkatkan cakupan wilayah mitigasi bencana agar semua daerah yang berada dalam kerawanan bencana dapat meminimalisir dampak bencana.
2. Saran untuk masyarakat Kelurahan Kota Karang agar lebih berperan aktif dalam program mitigasi bencana, karena dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal kebencanaan.

C. Penutup

Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, begitu juga dengan penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, bagi para pembaca penulis mohon kritik dan sarannya agar dimasa mendatang skripsi yang ada akan menjadi lebih baik dan berguna untuk penulis dan pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan khususnya bagi penulis sendiri,

Amiin Yaa Rabbal'Alamin.



Gambar proses sosialisasi oleh BPBD Kota Bandar Lampung



Gambar rapat koordinasi DESTANA (desa tangguh bencana)



Gambar proses pembidaian pada simulasi bencana



Gambar proses simulasi bencana



Gambar proses simulasi bencana

